PERLINDUNGAN HAK-HAK PENDIDIKAN ANAK DI WILAYAH KONFLIK RUSIA-UKRAINA[1]

Oleh :
Jacqueline Gracia Marine Siswanto.[2]
Cornelis Dj. Massie.[3]
Thor Bangsaradja Sinaga.[4]

ABSTRAK

Pendidikan merupakan hak asasi setiap anak yang harus dijamin pemenuhannya dalam segala situasi, termasuk dalam kondisi konflik bersenjata. Konflik Rusia-Ukraina yang mengalami eskalasi sejak tahun 2022 telah menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan pendidikan anak, seperti rusaknya fasilitas pendidikan, perpindahan penduduk secara paksa, terganggunya proses belajar mengajar, serta meningkatnya risiko kehilangan akses pendidikan bagi jutaan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap perlindungan hak pendidikan anak di wilayah konflik Rusia-Ukraina serta menganalisis implementasi perlindungan tersebut dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai instrumen hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pendidikan anak dalam situasi konflik bersenjata telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain *Convention on the Rights of the Child* 1989, *Geneva Conventions* 1949 beserta *Additional Protocols* 1977, *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, serta *Safe Schools Declaration*. Implementasi perlindungan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya pemerintah Ukraina dan organisasi internasional seperti UNICEF, UNESCO, dan ICRC dalam menjaga keberlangsungan pendidikan, menyediakan fasilitas pembelajaran alternatif, serta memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terdampak konflik. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hak pendidikan anak masih menghadapi berbagai hambatan akibat serangan terhadap infrastruktur pendidikan, pengungsian massal, trauma psikologis anak, serta keterbatasan akses terhadap sarana pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen dan kerja sama internasional guna menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak secara efektif selama maupun setelah konflik bersenjata berlangsung.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Pendidikan Anak, Hukum Internasional, Konflik Bersenjata, Rusia-Ukraina.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang diakui secara universal dan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan individu maupun masyarakat. Namun, dalam situasi konflik bersenjata, pemenuhan hak pendidikan anak sering kali terhambat akibat kondisi darurat yang mengganggu akses terhadap pendidikan. Berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC), UNESCO, UNICEF, dan ICRC, menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dalam keadaan apa pun.[5] Hak tersebut melekat pada setiap anak tanpa memandang latar belakang bangsa, agama, maupun status lainnya.[6]

Perhatian internasional terhadap perlindungan hak anak berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia I akibat banyaknya anak yang menjadi korban perang. Perkembangan tersebut melahirkan berbagai instrumen perlindungan anak hingga terbentuknya *Convention on the Rights of the Child* Tahun 1989 yang secara tegas mengatur

---

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010523
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Jimly Asshidiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 2.
[6] *Convention on the Rights of the Child*, Part I Article 2, 1989.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 CRC.[7] Pendidikan dipandang sebagai sarana penting bagi perkembangan kepribadian, kemampuan, serta masa depan anak sehingga pemenuhannya harus tetap dijamin, termasuk dalam kondisi konflik bersenjata.

Konflik Rusia-Ukraina merupakan salah satu contoh konflik bersenjata internasional yang berdampak besar terhadap hak pendidikan anak. Serangan yang terjadi sejak invasi Rusia telah menyebabkan ribuan fasilitas pendidikan di Ukraina mengalami kerusakan maupun kehancuran. Akibatnya, banyak anak kehilangan akses terhadap pendidikan formal dan terpaksa mengikuti pembelajaran secara bergiliran maupun jarak jauh yang kualitasnya terbatas. Selain itu, gangguan terhadap jaringan listrik dan internet turut menghambat proses pembelajaran daring yang menjadi alternatif selama konflik berlangsung.[8]

Dalam hukum humaniter internasional, sekolah dan fasilitas pendidikan termasuk objek sipil yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip pembedaan (*distinction*), prinsip proporsionalitas (*proportionality*), dan prinsip kewajiban menghormati hukum internasional (*compliance with the law*).[9] Selain itu, berbagai instrumen internasional seperti *Geneva Convention* 1949, *Additional Protocol I and II* 1977, *Convention on the Rights of the Child* 1989, dan *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* 2000 memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berada di wilayah konflik, termasuk hak mereka untuk memperoleh pendidikan.[10]

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak pendidikan anak di wilayah konflik masih menghadapi berbagai kendala. Kerusakan infrastruktur pendidikan, perpindahan penduduk secara paksa, trauma psikologis, serta keterbatasan akses terhadap sarana pembelajaran menyebabkan hak pendidikan anak belum dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum internasional dan implementasi yang lebih efektif untuk menjamin perlindungan hak pendidikan anak selama dan setelah konflik bersenjata. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji perlindungan hak-hak pendidikan anak di wilayah konflik Rusia-Ukraina dalam perspektif hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Hukum Internasional terhadap perlindungan hak pendidikan anak di wilayah konflik Rusia-Ukraina?
2. Bagaimana Implementasi perlindungan hak pendidikan anak di wilayah konflik Rusia-Ukraina dalam praktik?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional terhadap perlindungan Hak Pendidikan Di Wilayah Konflik Rusia-Ukraina

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang eskalasi besarnya dimulai tanggal 24 Februari 2022 dengan invasi militer berskala penuh oleh Federasi Rusia telah menimbulkan dampak yang sangat dahsyat terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat

[7] Shehzad Noorani, *Konvensi Hak Anak UNICEF*, 2021, Pasal 28.

[8] UNESCO, *Removing Scars of War Iraq Through Education*, 2023, diakses 12 Juni 2025.

[9] Keisya Maharani, "Hukum Humaniter Internasional dan Tantangan dalam Era Konflik Kontemporer," 2025, diakses 18 Juli 2025.

[10] Aisyah Fitriani, *Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Konflik Bersenjata Dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm. 4.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Ukraina, termasuk didalam sektor pendidikannya yang merupakan hak fundamental bagi setiap anak. Konflik ini bukan sekedar berdampak pada infrastruktur semata, melainkan juga melukai jiwa dan masa depan jutaan anak-anak yang seharusnya sudah menikmati masa pembelajaran mereka di sekolah. Dampak konflik terhadap pendidikan anak di Ukraina merupakan salah satu krisis kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi di Eropa sejak Perang Dunia II berakhir.

Sebelum invasi berskala penuh terjadi, Ukraina sebenarnya telah mengalami konflik bersenjata sejak tahun 2014, khususnya di wilayah Donbas, yaitu provinsi Donetsk dan Luhansk di bagian timur negara tersebut. Konflik yang bermula dari aneksasi Krimea oleh Rusia pada Maret 2014 dan pemberontakan separatis di Donbas telah terlebih dahulu mengganggu sistem pendidikan di wilayah terdampak. Ratusan sekolah telah rusak atau hancur, dan ribuan anak-anak terpaksa mengungsi. Ketika eskalasi besar terjadi pada Februari 2022, dampak terhadap pendidikan pun mencapai dimensi yang jauh lebih besar dan mengkhawatirkan.

Menurut data dari UNICEF *(United Nation Children Fund)* menunjukan bahwa 7,5 anak yang tinggal di Ukraina terdampak langsung oleh konflik bersenjata tersebut. Dari jumlah itu, lebih dari 5 juta anak termasuk mengungsi, baik sebagai pengungsi internal *(Internally Displace Person/IDPs)* maupun sebagai pengungsi yang melarikan diri ke luar negeri, Negara-negara seperti Polandia, Jerman, Republik Ceko, dan Moldova menjadi tujuan utama para pengungsi Ukraina situasi ini secara langsung memutuskan akses jutaan anak terhadap pendidikan yang selama ini diterima mereka disekolah-sekolah di Ukraina. Angka ini mercerminkan urgensi perlindungan hak pendidikan anak dalam situasi konflik bersenjata dan pentingnya peran organisasi internasional dalam memastikan keberlangsungan pendidikan sebagai hak fundamental anak serta infrastruktur pendidikan menjadi salah satu yang paling berdampak, di mana ribuan sekolah hancur di karenakan ledakan peledak dan *drone* yang digunakan oleh Rusia saat terjadinya konflik sedangkan 3.000 lembaga pendidikan hancur jadi secara keseluruhan 7.000 infrastruktur pendidikan di Ukraina telah hancur dan rusak di karenakan serangan dari Rusia sehingga anak-anak terhambat mengakses pendidikan formal.[11] Serangan terhadap fasilitas pendidikan ini bukan hanya sebagai hilangnya tempat belajar, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang secara tegas melarang penyerangan terhadap fasilitas sipil.[12]

Dimensi psikologis dan sosial-emosional. Anak-anak yang hidup dalam zona konflik mengalami trauma mendalam akibat paparan kekerasan, kehilangan anggota keluarga, dan ketidakpastian masa depan. Trauma ini berdampak signifikan terhadap kemampuan belajar dan menghambat perkembangan kongnitif anak. berbagai penelitian dalam bidang psikologi anak menunjukan bahwa anak-anak yang terpapar konflik bersenjata cenderung mengalami gangguan stress pasca-trauma *(Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD)*, kecemasan berlebihan, depresi dan berbagai gangguan perilaku yang semuanya menghambat proses pembelajaran. Di Ukraina, diperkirakan jutaan anak membutuhkan dukungan psikososial sebagai akibat dari pengalaman konflik yang

[11] Sri Wahyuni, 2024, *(Peran UNICEF dalam menangani permasalahan anak korban konflik Rusia-Ukraina 2022),* Thesis, Universitas Andalas

[12] International Committee of the Red Cross (ICRC). (1977). *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*. Geneva: ICRC.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

mereka alami.[13] Adapun itu konflik dimensi kelanjutan belajar, konflik memaksa banyak sekolah untuk beralih ke sistem pembelajaran jarak jauh mendadak, tanpa persiapan yang memadai. Sementara itu, banyak keluarga pengungsi tidak memiliki akses terhadap perangkat elektronik, koneksi internet, atau bahkan listrik yang stabil untuk mengikuti pembelajaran daring. Kesenjangan digital menciptakan jurang pendidikan yang semakin dalam, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di sisi lain, anak-anak Ukraina yang mengungsi ke luar negeri menghadapi hambatan bahasa, kurikulum yang berbeda, dan pengakuan ijazah yang menjadi tantangan tersendiri dalam melanjutkan pendidikan mereka.[14]

Berdasarkan *Convention on the Right of the Childs* (Konvensi Hak Anak) Tahun 1989 khususnya *Article 28* "*State Parties recognize the right of the child to education and with a view achieving this right progressively and on the basis equal opportunity, they shall, in particular (a): make primary education compulsory and available free to all"* pasal ini menjadi landasan hukum internasional yang mengikat bagi perlindungan hak pendidikan anak dalam situasi konflik. Lebih lanjut *Article 29* mengatur tujuan pendidikan, yang mencangkup pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik secara penuh; mengembangkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental; mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas; dan mengembangkan rasa hormat kepada lingkungan alam. Dalam konteks konflik bersenjata, *Article 38* secara khusus mengatur tentang kewajiban-kewajiban perlindungan anak dari konflik bersenjata:

1. Ayat 1 : Negara peserta wajib menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak-anak dalam pertentangan bersenjata;
2. Ayat 2 : Negara peserta akan mengambil sebuah langkah yang mungkin secara praktis untuk memastikan bahwa orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan;
3. Ayat 3 : Negara peserta akan menahan diri dari merekrut siapapun yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata.[15]

Dalam *Article 45* juga memberikan hak kepada UNICEF *(United Nation International Children Education Fund)* untuk diwakili dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan pasal-pasal Konvensi dalam lingkup mandat mereka, termasuk dalam advokasi hak pendidikan.[16] *Protokol Opsional Convention on the Right of the Child* mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata *(Optional Protocol on the Involvement of the Children in Armed Conflict/OPAC)* yang diadopsi pada tahun 2002 lebih lanjut memperkuat perlindungan ini dengan meningkatkan usia minimum menjadi 18 tahun.[17]

Penting dicatat bahwa *Conventions on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) mengatur prinsip non-diskriminasi dalam *Article 2* yang berarti bahwa hak-hak yang dijamin oleh konvensi ini berlaku bagi semua anak tanpa diskriminasi, termasuk anak-anak pengungsi dan anak-anak yang terdampak konflik. Prinsip ini menjadi landasan bagi upaya perlindungan hak pendidikan anak-anak

[13] Murthy, R. S., & Lakshminarayana, R. (2006). *Mental health consequences of war: A brief review of research findings. World Psychiatry*, 5(1), 25–30

[14] World Bank. (2023). *Ukraine education sector analysis: Navigating the crisis and building for the future*. Washington, D.C.: World Bank Group.

[15] opac.fhukum.unpatti.ac

[16] Ibid.

[17] International Committee of the Red Cross (ICRC). (2000). *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 25 May 2000*. Geneva: ICRC IHL Databases.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Ukraina yang mengungsi ke berbagai negara, di mana mereka berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan anak-anak warga setempat. Selain itu, Ukraina sebagai peserta Konvensi memiliki tugas wajib untuk mengambil semua langkah tepat untuk perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terdampak konflik.

Hukum Humaniter Internasional *(International Humanitarian Law/IHL)* atau yang dikenal juga dengan Hukum Perang *(law of war)* atau hukum konflik bersenjata *(law of armed conflict)* yang tercantum dalam *Convention Geneva 1949 and Additional Protocol 1977* merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata atas dasar kemanusiaan, memberikan perlindungan khusus kepada orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam permusuhan, termasuk anak-anak sebagai kelompok yang sangat rentan.[18]

Geneva Convention 1949 and Addtional Protocol 1977 merupakan pilar utama Hukum Humaniter Internasional. *Geneva Convention IV* tentang perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang secara khusus relevan dengan perlindungan anak di zona konflik. *Article 24 Geneva Convention IV* mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang yatim piatu atau terpisah dari keluarga mereka karena perang tidak boleh dibiarkan telantar.[19] Lebih lanjut, *Article 50 Geneva Convention* yang sama mewajibkan penguasa penduduk untuk memfasilitasi, dengan bantuan pihak berwenang nasional dan setempat, berfungsinya institusi yang didedikasikan untuk perawatan dan pendidikan anak-anak.

Additional Protocol I 1977 yang mengatur konflik bersenjata internasional memberikan perlindungan tambahan :

1. *Article 48* : Mewajibkan pihak dalam konflik untuk selalu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan;
2. *Article 51* : Melindungi penduduk sipil dari serangan, termasuk serangan yang bersifat teror;
3. *Article 52 :* Melindungi objek sipil dari serangan, termasuk sekolah dan fasilitas pendidikan.[20]

Sedangkan *Article 53* secara khusus melarang tindakan bermusuhan yang ditujukan terhadap monumen bersejarah, karya seni, atau tempat ibadah. Sekolah sebagai fasilitas sipil, sepenuhnya dilindungi oleh ketentuan-ketentuan ini.[21] Serangan yang disengaja terhadap sekolah merupakan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma Mahkama Pidana Internasional.

Additional Protocol II 1977 relatif terhadap *Geneva Convention 1949* yang berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional juga melindungi anak-anak dan pendidikan mereka dalam konflik internal.

Safe School Declaration adalah komitmen politik internasional yang diadopsi pada tahun 2015 untuk melindungi pendidikan selama konflik bersenjata. *Declaration* ini mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah praktis guna melindungi

[18] International Committee of the Red Cross (ICRC). (1977). *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*. Geneva: ICRC.

[19] Pictet, J. S. (Ed.). (1958). *Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949: Volume IV: Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*. Geneva: International Committee of the Red Cross.

[20] Sandoz, Y., Swinarski, C., & Zimmermann, B. (Eds.). (1987). *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*. Geneva: International Committee of the Red Cross & Martinus Nijhoff Publishers.

[21] United Nations. (1979). *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*. United Nations Treaty Series, vol. 1125, p. 3.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

siswa, guru dan sekolah dari serangan militer selama konflik bersenjata. Ukraina menjadi negara ke-100 yang mengesahkan *Safe School Declaration* pada 20 November 2019, tepat pada *World Children Day*. Dengan ini Ukraina menunjukan komitmen terhadap semua instrumen utama hak internasional:

1. Konvensi Hak Anak dan tiga protokol opsionalnya.
2. Prinsip Paris tentang perekrutan dan penggunaan anak prajurit.
3. Prinsip Vancouver tentang perlindungan anak dalam penjagaan perdamaian.
4. Dua perjanjian utama tentang penghapusan tentang pekerja anak.[22]

Adapun klausul penting dalam *Safe School Declaration* :

1. Negara-negara yang menandatangani berjanji untuk menggunakan kekuataan politik mereka untuk melindungi anak-anak dan pendidikan mereka selama perang.
2. Berkomitmen untuk menyelidiki dan menuntut penjahat yang melanggar hukum perang dengan menyerang sekolah.
3. Membantu korban serangan pendidikan.
4. Berusaha melanjutkan pendidikan aman selama masa perang dan memulihkan akses setelah serangan.
5. Melindungi sekolah dari penggunaan militer[23].

Ukraina telah mengeluarkan perintah militer tingkat tinggi untuk menghindari penggunaan sekolah sebagai markas militer dalam menghadapi invasi penuh Rusia, yang menunjukan implementasi konkret dari *Safe School Declaration.* Namun, Rusia belum menandatangani *Declaration* tersebut, yang menunjukan adanya kesenjangan dalam komitmen terhadap perlindungan pendidikan selama konflik.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang relevan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Resolusi 1612 (2005) merupakan sebuah tonggak penting yang mendirikan mekanisme pemantauan dan pelaporan *(Monitoring and Reporting Mechanism/MRM)* untuk mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap anak dalam situasi konflik bersenjata.[24] Enam pelanggaran berat yang diidentifikasi dalam mekanisme ini mencangkup :

1. Pembunuhan dan Mutilasi.
2. Perekrutan anak sebagai tentara.
3. Penyerangan terhadap sekolah atau rumah sakit.
4. Pemerkosaan dan kekerasan seksual.
5. Penculikan.
6. Penolakan akses kemanusiaan.[25]

Resolusi-resolusi Dewan Keamanan berikutnya, termasuk Resolusi 1882 (2009) dan Resolusi 1998 (2011), memperkuat mekanisme perlindungan anak dalam konflik bersenjata, termasuk perlindungan sekolah sebagai fasilitas yang tidak boleh diserang. Meskipun demikian, dengan hak veto yang dimiliki Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, berbagai upaya untuk mengeluarkan resolusi

[22] Yulia Gurborna, 2021, *Ukraine Becomes 100th Country to Endorse Safe Schools Declaration, Over 750 Ukrainian Education Facilities Damaged, Destroyed in Fighting,* Artikel, Ukraine

[23] Zama Neff, 2024, *120 Countries Have Signed The Safe School Declaration. Sadly, The U.S. Isn't One Of Them,* Artikel

[24] Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. (2014). *Guidelines: Monitoring and reporting mechanism on grave violations against children in situations of armed conflict*. New York: United Nations.

[25] United Nations. (2014). *Guidelines: Monitoring and reporting mechanism (MRM) on grave violations against children in situations of armed conflict*. New York: United Nations.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

yang secara khusus mengutuk tindakan Rusia di Ukraina menghadapi hambatan serius, sehingga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa memainkan perang penting melalui resolusi-resolusinya yang bersifat tidak mengikat secara hukum namun memiliki signifikan politik yang besar.

*United Nation Children Fund (*UNICEF) merupakan badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang secara khusus ditugaskan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Sejak krisis Ukraina dimulai UNICEF telah berada di garis terdepan dalam upaya respon kemanusiaan dengan fokus utama pada perlindungan anak, akses pendidikan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak yang terdampak konflik. Kehadiran UNICEF di Ukraina bahkan telah ada jauh sebelum eskalasi tahun 2022, sehingga memungkinkan organisasi ini untuk merespons krisis dengan cepat dan terkoordinasi. Adapun mandat UNICEF mencangkup lima area utama :

1. Kelangsungan hidup dan perkembangan *(Survival and Development)*.
2. Perkembangan anak usia dini *(Early Chilhood Development).*
3. Pendidikan *(Education)*.
4. Perlindungan anak *(Child Protection).*
5. Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS pada anak (*HIV/AIDS).*[26]

Dalam konflik Rusia-Ukraina, UNICEF menjalankan perannya melalui 3 fungsi utama menurut konsep organisasi internasional Kelly Kate S. Pease[27] :

1. *Problem Solver*

UNICEF sebagai *Problem Solver* menyediakan forum tingkat kawasan untuk membahas hambatan akses pendidikan anak-anak di Ukraina di negara pengungsi dan menciptakan mekanisme penyelesaian masalah melalui kerja sama kolektif dengan UNHCR dan mitra lainnya.

Inisiatif Blue Dot : UNICEF berkolaborasi mendirikan *Blue Dot* di negara-negara penerima pengungsi untuk memberikan layanan terpadu bagi anak pengungsi Ukraina, termasuk layanan pendidikan. *Blue Dot* adalah inisiatif bersama UNICEF, UNCHR dan pemerintahan Uni Eropa yang menyediakan

a) Layanan perlindungan anak terpadu.
b) Akses pendidikan dan program pembelajaran.
c) Dukungan psikososial.
d) Informasi dan orientasi untuk keluarga pengungsi.

UNICEF juga bekerjasama dengan Kementrian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Ukraina untuk mengembangkan strategi nasional *Online School* yang bertujuan mengreintregasi lebih dari 350.000 anak ke dalam lingkungan pembelajaran tradisional atau *hibrida*.

2. Capacity Builder

UNICEF melakukan pelatihan melindungi Hak Asasi Manusia anak, mencegah perdagangan anak, kekerasan, eksploitasi seksual pada anak, serta pelatihan mengenai GBV *(Gender Based Violance)*. Pelatihan ini meningkatkan kapasitas lokal dalam memastikan kelangsungan pendidikan anak bahkan dalam situasi konflik. Dan juga penguatan kapasitas institusi pendidikan.

3. *Aid Provider*

UNICEF memberikan bantuan konkret berupa :

a) Tas dan perlengkapan sekolah.
b) Laptop dan tablet.
c) Ruang belajar darurat dan *learning kits.*

Lebih lanjut juga, UNICEF mempunyai program pendidikan di Ukraina :

a) Program *Education In Emergencies* (EiE) atau pendidikan dalam Keadaan

[26] UNICEF. (2021). *UNICEF strategic plan 2022–2025: Renewed ambition for every child*. New York: UNICEF Executive Board

[27] Pease, K.-K. S. (2018). *International organizations: Perspectives on global governance* (6th ed.). New York: Routledge

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Darurat merupakan salah satu program andalan UNICEF yang dirancang khusus untuk memastikan kelangsungan akses pendidikan bagi anak-anak dalam situasi krisis, termasuk konflik bersenjata. Di Ukraina, program EiE UNICEF telah menjangkau jutaan anak-anak yang terdampak konflik melalui pembelajaran baik daring maupun luring.[28]

b) Program *Back To Learning* merupakan salah satu inisiatif paling komprehensif yang diluncurkan UNICEF sebagai respons terhadap krisis pendidikan di Ukraina. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak-anak Ukraina, terlepas dari lokasi mereka, memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.[29]

Adapun juga advokasi UNICEF untuk perlindungan Sekolah dan Pendanaan Pendidikan, selain program-program operasional di lapangan, UNICEF juga memainkan peran krusial sebagai advokat bagi perlindungan hak pendidikan di tingkat internasional. Melalui laporan-laporan reguler dan komunikasi publik, UNICEF mendokumentasikan dan mempublikasikan data-data terkait dampak konflik terhadap pendidikan anak di Ukraina, termasuk jumlah sekolah yang rusak dan hancur, jumlah anak yang tidak dapat mengakses pendidikan, sebagai berikut:[30]

1. Skala Kerusakan Pendidikan di Ukraina :
   a) Lebih dari 340 fasilitas pendidikan rusak atau hancur hanya pada tahun 2025.
   b) Total sekolah yang rusak atau hancur sejak perang meningkat pada Februari 2022 telah mencapai 2.800 sekolah.
   c) 1.116 sekolah telah diverifikasi oleh PBB mengalami kerusakan, meskipun angka sebenarnya jauh lebih tinggi.
   d) Menurut Kementrian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Ukraina, 3.524 Institusi pendidikan telah rusak sejak awal invasi penuh, dengan 360 hancur total.
2. Jumlah Anak Terdampak :
   a) 4,6 Juta anak di Ukraina kesulitan mengakses pendidikan saat memasuki tahun akademik keempat dibawah perang penuh.
   b) Hampir 1 Juta anak terpaksa belajar online karena sekolah ditutup akibat permusuhan atau tidak adanya shelter yang tepat.
   c) 7,5 Juta anak yang tinggal di Ukraina mengalami gangguan pendidikan akibat konflik.

Adapun status sekolah di Ukraina :

a) Pendidikan penuh waktu : 6.577 sekolah (53,1%)
b) Campuran : 3.362 sekolah (27,1%)
c) Pembelajaran jarak jauh : 2.455 sekolah (19,8%)

Ini adalah pemaparan data dampak konflik yang menyebabkan berbagai infrasruktur pendidikan hancur dan rusak.[31]

UNICEF juga melakukan advokasi kepada pemerintah-pemerintah di seluruh dunia untuk menyediakan penandaan yang memandai bagi respons pendidikan darurat di Ukraina. Dalam berbagai forum internasional, termasuk konferensi donor dan pertemuan tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa, UNICEF secara aktif menyuarakan kebutuhan

[28] UNICEF. (2024). *UNICEF Ukraine humanitarian situation report (Mid-year review)*. Kyiv: UNICEF.

[29] UNICEF Ukraine. (2023). *Back to learning: Ensuring education continuity for children in Ukraine*. Kyiv: UNICEF Press Centre

[30] Ibid.

[31] UNESCO. (2024). *Assessing the damages and structural impacts on education in Ukraine*. Paris: UNESCO

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

mendesak akan penandanaan yang berkelanjutan dan memadai untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi jutaan anak-anak di Ukraina. Melalui koordinasi dengan *Global Education Cluster (Cluster Pendidikan Global)* yang dipimpin oleh UNICEF dan *Save The Children,* respons pendidikan darurat di Ukraina dikoordinasikan secara komprehensif antara berbagai aktor kemanusiaan.[32]

United Nations Educational, Scientific and cultural Organization (UNESCO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mempromosikan perdamaian dan pembangunan manusia melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan komunikasi. Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, UNESCO memainkan peran yang berbeda namun saling melengkapi dengan UNICEF, dengan fokus khusus pada kebijakan pendidikan, perlindungan warisan budaya yang berkaitan dengan identitas dan pendidikan, serta pemantauan dan dokumentasi pelanggaran terhadap hak atas pendidikan. UNESCO memiliki mandat khusus untuk memantau dan mendokumentasikan perkembangan situsi pendidikan di wilayah konfik. Sejak eskalasi konflik pada Februari 2022, UNESCO telah secara aktif mengumpulkan dan menganalisis data terkait dampak konflik terhadap sistem pendidikan Ukraina. Melalui *Situational Country-level Data on Education* (SCOPE), sebuah platform pemantauan pendidikan global, UNESCO menyediakan data real time tentang kondisi sekolah dan kapasitas sistem pendidikan Ukraina untuk merespons krisis.[33]

Adapun mandat khusus pendidikan UNESCO tersebut :

1. Memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas bagi semua.
2. Membangun kapasitas sistem pendidikan nasional.
3. Melindungi infrastruktur pendidikan dari kerasukan.
4. Mempromosikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.[34]

Salah satu kontribusi penting UNESCO adalah pelacakan serangan terhadap fasilitas pendidikan. UNESCO, bekerja sama dengan berbagai mitra, telah mendokumentasikan ratusan serangan terhadap sekolah dan universitas di Ukraina sejak Februari 2022. Dokumentasi ini mencangkup koordinat geografis fasilitas yang diserang, jenis kerusakan yang terjadi, dan dampaknya terhadap kapasitas pendidikan di wilayah terkait.[35] Data ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk advokasi internasional dan upaya akuntabilitas terhadap pihak pihak yang bertanggung jawab. UNESCO juga memantau dampak konflik terhadap tingkat partisipasi pendidikan. Data yang dikumpulkan UNESCO menunjukan adanya penurunan dramatis dalam angka partisipasi pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang paling terdampak konflik. Analisis UNESCO mengungkapkan bahwa kesenjangan pendidikan yang timbul akibat konflik berpotensi berdanpak panjang terhadap modal manusia Ukraina dan prospek pembangunan negara tersebut pasca konflik. Laporan-laporan UNESCO ini menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan dan donor internasional dalam merancang respons yang tepat sasaran.

UNESCO juga sudah bergabung dengan *Ministry of Education and Science of Ukraine)* dan mitra sejak awal perang untuk mendukung

[32] Global Education Cluster. (2020). *Global education cluster strategic plan 2021–2023: Co-led by UNICEF and Save the Children*. Geneva: Global Education Cluster.

[33] UNESCO. (2021). *Scoping Progress in Education (SCOPE) online database*. Paris: Global Education Monitoring Report / UNESCO.

[34] UNESCO. (2023). *What UNESCO does in education: Mandate and core priorities*. Paris: UNESCO.

[35] Ministry of Education and Science of Ukraine. (2026). *Saveschools: Interactive map of destroyed and damaged educational institutions in Ukraine*. Kyiv: MESU.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

komunitas pendidikan Ukraina dalam menanggapi tantangan utama :

1. Infrastruktur pendidikan yang rusak.
2. Akses ke perangkat untuk pendidikan jarak jauh.
3. Kesehatan mental dan kesejahteraan yang memburuk dari aktor pendidikan.
4. Kebutuhan pembangunan kapasitas dan pengembangan profesional guru.[36]

UNESCO telah meluncurkan berbagai inisiatif kebijakan untuk mendukung sistem pendidikan di Ukraina dalam menghadapi krisis. Salah satu yang paling signifikan adalah program *Responding to the Education Crisis in Ukraine* yang berfokus pada empat area prioritas : pertama, memastikan kelanjutan pembelajaran bagi anak-anak yang terdampak; kedua, mendukung guru dan tenaga pendidik; ketiga, memperkuat koordinasi internasional dalam respons pendidikan; keempat, merencanakan rekontruksi sistem pendidikan jangka panjang.[37] Dalam area prioritas pertama, UNESCO mendukung pengembangan kurikulum adaptif yang dapat diimplementasikan dalam berbagai kondisi dan konteks, termasuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di pengungsian, dan pembelajaran di zona konflik. UNESCO juga mendukung pemngembangan materi yang secara eksplisit mengintregasikan elemen-elemen pendidikan perdamaian, keberagaman, dan hak asasi manusia, sebagai bagian dari upaya mempersiapkan anak-anak Ukraina untuk masa depan yang penuh tantangan namun juga harapan.[38]

UNESCO juga memainkan peran dengan Aktor-Aktor Pendidikan Internasional dalam mengkoordinasikan respons internasional terhadap krisis pendidikan di Ukraina. Melalui keanggotaanya dalam *Inter-Agency Standing Committee* (IASC) dan kemimpinannya dalam berbagai forum pendidikan internasional, UNESCO mendorong adanya respons yang koheren dan terkoordinasi dari seluruh komunitas internasional terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak Ukraina. Dalam kerangka koordinasi ini, UNESCO bekerja sama erat dengan UNICEF, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa, Uni Eropa dan berbagai organisasi non-pemerintah untuk menghindari duplikasi upaya dan memaksimalkan dampak dari sumber daya yang terbatas. Termasuk rehabilitasi infrastruktur pendidikan dengan dukungan Uni Eropa :

1. Proyek Perbaikan Sekolah, dengan dukungan Uni Eropa 10 sekolah telah diperbaiki di Ukraina pada Agustus 2025.
2. 44 Fasilitas pendidikan telah direhabilitasi di seluruh wilayah Kyiv, Kharkiv, Cherniviv, dan Sumy.
3. Secara total, proyek ini merenovasi lebih dari 70 institusi pada akhir 2025.
4. Didukung anggaran EUR 28 juta.[39]

UNESCO secara khusus memimpin koordinasi dalam hal kebijakan pendidikan dan pengembangan kapasitas pendidikan, sementara UNICEF lebih berfokus pada respons operasional langsung di lapangan guna memimpin koordinasi respons secara keseluruhan.

International Committee of the Red Cross (ICRC) Komite Internasional Palang Merah, merupakan organisasi kemanusiaan netral, tidak memihak, dan independen yang

[36] Ministry of Education and Science of Ukraine. (2026). *Saveschools: Interactive map of destroyed and damaged educational institutions in Ukraine*. Kyiv: MESU.

[37] UNESCO. (2026). *Four years on: Supporting culture, education, sciences and journalist's safety in Ukraine*. Paris: UNESCO

[38] UNESCO. (2024). *Recommendation on education for peace, human rights and sustainable development*. Paris: UNESCO.

[39] Mykhailo Turianystsia, (2025), *Another 10 schools repaired in Ukraine with EU support – thousand of children to return to classroom this autumn,* Artikel

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

memiliki mandat khusus berdasarkan Hukum Humaniter Internasional untuk melindungi warga sipil termasuk anak-anak dalam konflik bersenjata. ICRC didirikan pada 1864 dan berkedudukan di Jenewa, Swiss dan mandat berdasarkan *Geneva Convention* 1949 dan *Additional Protocol 1977,* serta Statuta Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Mandat ini memberikan ICRC akses khusus ke wilayah-wilayah konflik dan kewenangan untuk berinteraksi langsung dengan semua pihak yang berkonflik, termasuk pihak-pihak komunitas internasional.

ICRC memainkan peran yang berbeda secara fundamental dari UNICEF dan UNESCO dalam konteks perlindungan hak pendidikan anak di Ukraina, dengan pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dan netralitas yang ketat. Prinsip-prinsip dasar memandu kerja ICRC adalah kemanusiaan, ketidakberpihakan, netralitas, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan universalitas. Prinsip netralitas dan ketidakberpihakan secara khusus penting dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, di mana sentimen politik yang kuat di komunitas internasional dapat mempengaruhi kemampuan organisasi kemanusiaan untuk beroprasi di kedua sisi garis konflik. ICRC berkomitmen untuk tidak mengambil posisi mengenai isu-isu politik atau militer yang menjadi sumber konflik, melainkan berfokus sepenuhnya pada perlindungan kemanusiaan bagi semua pihak yang terdampak.[40]

Dalam konteks perlindungan anak di Ukraina, ICRC mengambil pendekatan yang berfokus pada beberapa dimensi kunci, Pertama, ICRC berupaya memastikan bahwa semua pihak yang berkonflik mematuhi ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang relevan dengan perlindungan anak dan pendidikan. Melalui dialog bilateral yang bersifat rahasia dengan pihak-pihak yang berkonflik, ICRC menyampaikan kekhawatiran mengenai pelanggaran yang terjadi dan mendorong pihak-pihak tersebut untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi warga sipil, termasuk anak-anak.[41]

Dalam perbandingan UNICEF, UNESCO dan ICRC dalam respons terpadu memiliki mandat, pendekatan, dan fokus yang berbeda-beda. Ketiga organisasi ini baru berkoordinasi secara efektif untuk memaksimalkan dampak dari upaya perlindungan hak pendidikan anak di Ukraina. Koordinasi ini tidak selalu mudah, mengingat perbedaan-perbedaan mendasar dalam kultur organisasi, pendekatan terhadap keterlibatan publik, dan hubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik.[42]

Dalam Kerangka *United Nation Cluster System*, UNICEF mempimpin Cluster Pendidikan *(Education Cluster)* yang menyediakan platform koordinasi bagi seluruh aktor kemanusiaan yang bekerja di sektor pendidikan di Ukraina. UNESCO berpartisipasi aktif dalam cluster ini sebagai mitra teknis. Sementara, ICRC terlibat sebagai observer mengingat statusnya yang unik sebagai organisasi yang netral dan independen yang secara tradisional menghindari intergrasi penuh ke dalam sistem Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mempertahankan netralitasnya.[43] Salah satu area di mana koordinasi antara ketiga organisasi ini sangat penting adalah dalam hal pendokumentasian pelanggaran-

[40] Spoljaric, M. (2023). *A call for respect for International Humanitarian Law in Ukraine and global conflicts*. Geneva: International Committee of the Red Cross

[41] Harroff-Tavel, M. (2021). *The humanitarian diplomacy of the International Committee of the Red Cross*. Geneva: International Committee of the Red Cross

[42] Global Policy Institute. (2025). *Compounding mandates: The friction and synergy between UN agencies and the ICRC in the Ukraine crisis*. London: GPI Research Press

[43] Ibid.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pelanggaran terhadap hak pendidikan anak. UNICEF dan UNESCO lebih terbuka dalam mempublikasikan data dan laporan terkait pelanggaran-pelanggaran ini, sementara ICRC menggunakan pendekatan yang lebih rahasia melalui dialog langsung dengan pihak-pihak yang berkonflik. Kedua pendekatan ini saling melengkapi : Publikasi terbuka oleh UNICEF dan UNESCO menciptakan tekanan publik internasional, sementara dialog rahasia ICRC dapat menghasilkan perubahan konkret di lapangan dalam melindungi hak pendidikan anak.

B. Implementasi Perlindungan Hak Pendidikan Anak di Wilayah Konflik Rusia-Ukraina Dalam Praktik

Dalam praktiknya merespons hal yang dilakukan dalam melindungi Hak Pendidikan anak di wilayah konflik Rusia-Ukraina dalam praktiknya yang paling signifikan untuk dilakukan pemerintah Ukraina menjamin kelangsungan hak pendidikan anak adalah pengembangan sistem daring, dalam platformnya *"All-Ukrainian School Online"* yang diluncurkan segera setelah invasi dimulai menyediakan kurikulum daring bagi lebih dari 4 Juta siswa. Sistem ini mengintregasikan video pembelajaran, tugas daring, dan dukungan guru secara virtual dalam format yang dapat diakses melalui berbagai perangkat.[44]

Keberhasilan ini bergantung pada kondisi infrastruktur digital yang sangat bervariasi di berbagai wilayah Ukraina. Di kota-kota besar seperti Kyiv, Kharkivc Cherviv akses internet relatif terjaga meskipun terjadi pemadaman listrik periodik. Sebaliknya, di wilayah timur dan selatan yang menjadi zona konflik aktif, ketiadaan listrik dan jaringan internet menjadi hambatan struktual yang tidak dapat diatasi hanya dengan platform digital.[45]

Dari perspektif pemenuhan hak pendidikan dalam kerangka Konvensi Hak Anak, sistem daring ini merupakan bentuk adaptasi yang mencerminkan kewajiban negara untuk "mengambil langkah yang sesuai" *(Article 28)*. Namun, sistem ini juga mengekspos kesenjangan struktual dalam pemenuhan hak tersebut : anak-anak dari keluarga miskin, daerah terpencil atau tanpa perangkat digital *effectively* mengalami pengucilan dari hak pendidikan mereka meskipun secara formal sistem tersedia.[46]

Salah satu inovasi menonjol juga yang muncul dari konflik Rusia-Ukraina adalah pembangunan ruang belajar bawah tanah disekolah-sekolah yang masih beroperasi di wilayah rawan serangan udara. Per akhir 2023, lebih dari 1.200 bunker sekolah telah dibangun atau sedang dalam proses pembangunan, terutama di wilayah Kharkiv, Zaporizhzhia, Mykolaiv, dan Dnipro.[47]

Ruang-ruang bawah tanah dirancang bukan sebagai tempat perlindungan sementara melainkan sebagai ruang belajar permanen yang fungsional. Dilengkapi dengan kursi, meja, papan tulis, pencahayaan, ventilasi, dan koneksi internet, bunker-bunker ini memungkinkan proses belajar-mengajar berlanjut bahkan selama peringatan serangan udara. Dalam beberapa kasus, anak-anak menghabiskan seluruh hari sekolah mereka dibawah tanah, naik ke permukaan hanya setelah peringatakan dinyatakan aman.[48]

[44] UNICEF. (2023). *Education under attack in Ukraine: Digital learning solutions and the resilience of the sub-sector*. Kyiv: UNICEF Ukraine Country Office

[45] UNICEF. (2024). *In the dark: The impact of electricity shortages on children's education in Ukraine*. Kyiv: UNICEF Ukraine Country Office.

[46] NICEF. (2024). *Education continuity and learning loss in Ukraine: Assessing equity and access under crisis*. Kyiv: UNICEF Ukraine Country Office

[47] Kharkiv City Council. (2024). *The launch of Ukraine's first purpose-built underground school in Kharkiv*. Kharkiv: Mayor's Office Media Service.

[48] Kharkiv City Council. (2024). *Operational framework and technical design of the newly*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Dari perpsektif Hukum Internasional, inovasi ini merceminkan interpretasi atas kewajiban negara dalam Konvensi Hak Anak dan Hukum Humaniter Internasional untuk memastikan pemenuhan hak pendidikan bahkan dalam kondisi konflik aktif. Namun, inovasi ini juga mengangkat pertanyaan penting tentang dampak psikologis jangka panjang dari pembelajaran dalam kondisi ketakutan kronis, yang bertentangan dengan tujuan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam *Article 29* yang menekankan pengembangan kepribadian dan kesejahteraan anak dalam hak pendidikan.[49]

Lebih dari 1,9 Juta anak Ukraina telah mengungsi ke luar negeri, terutama ke negara-negara Uni Eropa seperti Polandia, Jerman, Republik Ceko, Slovakia, dan Rumania. Respons negara-negara penerima terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak pengungsi ini menjadi ujian penting bagi implementasi norma-norma perlindungan pengungsi internasional, khususnya Kovensi Pengungsi 1951 dan Deklarasi *New York* 2016.[50]

Uni Eropa mengambil langkah tidak biasa dengan mengaktifkan *Temporary Protection Directive* (Directive Perlindungan Sementara) untuk pertama kalinya sejak dibuatnya pada tahun 2001. Direktif ini memberikan status perlindungan sementara secara otomatis kepada warga Ukraina di seluruh negara anggota EU, termasuk hak akses pendidikan. Implementasinya bervariasi di antara negara-negara anggota : Polandia mengintregasikan lebih dari 200.000 anak Ukraina ke sistem sekolah reguler, sementara beberapa negara lain mendirikan kelas-kelas khusus yang terpisah.[51]

Tantangan utama yang diindentifikasikan dalam proses intregasi pendidikan ini mencangkup :

a) Hambatan bahasa yang signifikan, mengingat bahasa Ukraina tidak memiliki kedekatan dengan sebagian besar bahasa Eropa Barat;
b) Perbedaan kurikulum dan sistem penilaian yang mempersulit pengakuan pencapaian akademik sebelumnya;
c) Trauma psikologis yang mempengaruhi kemampuan belajar;
d) Ketidakpastian mengenai durasi pengungsian yang mempengaruhi motivasi belajar baik anak maupun orang tua.[52]

Adapun ketiga organisasi memiliki cakupan dan efektifitas yang berbeda dalam implementasi perlindungan hak pendidikan anak. UNICEF memiliki cakupan terbesar dengan menjangkau 435.033 anak pada tahun 2024, meskipun ini masih hanya 5,8 persen dari total 7,5 Juta anak yang membutuhkan. UNESCO memiliki cakupan yang lebih kecil dengan menjangkau 7.400 pendidik dan merehabilitasi 44 fasilitas pendidikan, namun dampaknya signifikan karena rehabilitas sekolah memungkinkan ribuan anak kembali ke kelas. ICRC memiliki cakupan terkecil dengan hanya 4.218 anak yang menerima *School Kits*, namun ICRC memiliki akses unik ke wilayah tidak dapat dijangkau oleh organisasi lain.

Dari segi efektivitas, UNICEF memiliki efektivitas tertinggi dalam memberikan bantuan langsung kepada anak-anak melalui program *Learning Kits, Catch-up Classes,* dan

constructed Kharkiv underground school. Kharkiv: Mayor's Office Media Service

[49] UNICEF. (2024). *The psychological toll: War, chronic stress, and the mental health of children in frontline regions of Ukraine*

[50] UNICEF, & UNHCR. (2024). *Education on the move: Integration of Ukrainian refugee children in European host countries' education systems*

[51] Council of the European Union. (2022). *Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine*

[52] OECD. (2023). *The integration of Ukrainian refugee children in host countries' education systems: Challenges and practices*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

bantuan uang tunai. UNESCO memiliki efektivitas menengah dalam rehabilitasi infrastruktur pendidikan, namun terkendala oleh kesenjangan besar antara kebutuhan dan kapasitas. ICRC memiliki efektivitas menengah dalam advokasi Hukum Humaniter, namun tidak memiliki kekuatan penegakkan untuk memastikan kepatuhan nyata.[53]

Ketiga organisasi tidak bertindak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dalam perlindungan hak pendidikan anak. UNICEF menyediakan learning kits dan pendidikan remedial untuk anak-anak yang kehilangan akses ke sekolah, sementara UNESCO menyediakan platform digital dan pelatihan guru untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. ICRC memastikan akses aman ke wilayah yang membutuhkan bantuan pendidikan melalui negoisasi dengan kedua belah pihak.[54]

Dalam rehabilitasi infrastruktur, UNESCO memimpin rehabilitasi 44 fasilitas pendidikan dengan dukungan EU, sementara UNICEF menyediakan perlengkapan sekolah untuk sekolah yang baru direhabilitasi. ICRC mempromosikan kepatuhan terhadap hukum humaniter untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Dalam perlindungan anak, UNICEF memberikan perlindungan holistik termasuk kesehatan, WASH, dan pendidikan. UNESCO memastikan lingkungan pendidikan yang aman melalui program *"Safe Educational Enviroment"*. ICRC melakukan reunifikasi keluarga untuk anak yang terpisah dari orang tua.

Mekanisme koordinasi antara tiga organisasi mencakup *Blue Dot Initiative* yang merupakan kerjasama antara UNICEF dan UNHCR yang juga melibatkan UNESCO dan ICRC dalam memberikan layanan terpadu bagi anak-anak di Ukraina. *Humanitarian Coordination Mechanism* juga memungkinkan ketiga organisasi untuk berpartisipasi dalam mekanisme koordinasi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk memastikan bantuan terkoordinasi dengan baik. *Joint Advocacy* memungkinkan ketiga organisasi untuk melakukan advokasi bersama kepada pemerintah Rusia dan Ukraina untuk menghormati hak pendidikan anak.[55]

Untuk mengevalusi efektivitas implementasi perlindungan hak pendidikan amak, beberapa indikator dapat digunakan. Indikator pertama adalah persentase anak yang terjangkau dari total anak yang membutuhkan. Berdasarkan data, UNICEF menjangkau 435.033 anak dari total 7.5 Juta anak yang membutuhkan, yang berarti hanya 5,8 persen. Indikator kedua adalah persentase sekolah yang diperbaiki dari total sekolah yang rusak, yang berarti hanya 1,2 persen. Indikator ketiga adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum humaniter, yang dapat diukur dari jumlah serangan terhadap sekolah.

Berdasarkan indikator-indikator ini, implementasi perlindungan hak pendidikan anak dapat dikategorikan belum optimal. Kesenjangan antara kebutuhan dan capaian sangat besar dan tingkat kepatuhan terhadap hukum humaniter masih rendah.

Meskipun implementasi belum optimal, terdapat beberapa faktor yang mendukung kesuksesan implementasi. Faktor pertama adalah kerangka hukum yang kuat dengan Hukum Humaniter Internasional, dan *Save Schools Declarations* yang mengikat negara-negara peserta. Faktor kedua adalah sinergi antar organisasi yang saling melengkapi dan

[53] nter-Agency Standing Committee (IASC). (2024). *In-depth evaluation of the inter-agency humanitarian response in Ukraine: Operational efficiencies and structural barriers*

[54] UNICEF, & UNESCO. (2024). *Joint framework for educational recovery in Ukraine: Bridging immediate learning needs and systemic digital transformation*

[55] UNICEF, & UNHCR. (2023). *Blue Dot hubs: A joint UNICEF-UNHCR UNHCR initiative for protection and support services for children and families displaced from Ukraine*.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tidak tumpang tindih. Faktor ketiga adalah dukungan pendanaan dari donor internasional seperti Uni Eropa dan pemerintah Swiss. Faktor keempat adalah kapasitas respons cepat dengan program konkret yang memiliki hasil terukur.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan implementasi belum optimal. Faktor pertama adalah kesenjangan skala antara kerusakan yang masih (3.524 institusi pendidikan rusak) dan kapasitas respons yang terbatas (hanya 44 yang diperbaiki). Faktor kedua adalah keterbatasan akses ke wilayah konflik, terutama wilayah front line yang tidak aman untuk pekerja kemanusiaan. Faktor ketiga adalah konflik yang masih berlangsung sehingga kerusakan terus terjadi lebih cepat dari rehabilitasi. Faktor keempat adalah ketergantungan pada pendanaan yang tidak stabil dan tidak mencukupi kebutuhan. Faktor kelima adalah tidak adanya mekanisme penegak hukum yang relatif, sehingga pelanggaran hukum humaniter tidak dituntut.

Implementasi perlindungan hak pendidikan anak di wilayah konflik Rusia-Ukraina melalui UNICEF, UNESCO, dan ICRC belum mampu menangani sepenuhnya masalah yang dihadapi anak-anak Ukraina. Namun, upaya ketiga organisasi ini tetap krusial dalam memastikan pendidikan tidak terputus total. Tanpa upaya ketiga organisasi ini, jumlah anak yang kehilangan akses pendidikan akan jauh lebih besar.

Hambatan struktural yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak pendidikan anak mencakup kerusakan infrastruktur yang masif. Sebanyak 3.524 instituai pendidikan telah rusak sejak awal invasi penuh, dengan 360 hancur total. Kerusakan ini jauh melebihi kapasitas rehabilitasi ketiga organisasi. Hambatan struktual kedua adalah keterbatasan akses ke wilayah konflik, terutama wilayah *Front Line* yang tidak aman untuk pekerja kemanusiaan. Hambatan struktual ketiga adalah pemandaman listril yang disebabkan oleh serangan terhadap infrastruktur energi, yang secara signifikan menganggu pendidikan online.

Hambatan operasional yang dihadapi mencangkup keterbatasan pendanaan yang melebihi ketersediaan dana. Banyak program organisasi kemanusiaan bersaing untuk dana yang terbatas dalam krisis Ukraina dan krisis global lainnya. Hambatan operasional kedua adalah burnout pekerja kemanusiaan akibat konflik berkepanjangan yang sudah berlangsung 4 tahun sejak 2022. Hambatan operasional ketiga adalah trauma psikologis anak korban konflik yang sulit fokus belajar, meskipun akses pendidikan tersedia.

Implementasi perlindungan hak pendidikan anak di Ukraina memiliki implikasi penting bagi hukum internasional. Pertama, krisis ini menguji efektivitas ketiga organisasi internasional dalam konflik bersenjata modern dan menunjukan bahwa meskipun kerangka hukum kuat, implementasi masih terhambat oleh fakta di lapangan. Kedua, respons terhadap krisis Ukraina menciptakan *precedent* untuk perlindungan pendidikan anak dalam konflik bersenjata di masa depan. Ketiga, krisis ini menunjukkan keterbatasan mekanisme *non-biding* seperti *Safe Schools Declarations* yang tidak memiliki kekuatan penegakan.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik mencakup perlunya mekanisme penegakan yang lebih kuat untuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Perlunya juga pendanaan lebih besar untuk pendidikan dalam kemanusiaan darurat, serta koordinasi lebih baik antara organisasi internasional untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan bantuan mencapai penerima yang paling membutuhkan.

Implikasi bagi pratiksi mencakup pentingnya sinergi antara UNICEF, UNESCO dan ICRC yang saling melengkapi. Perlu akses netral seperti ICRC untuk wilayah konflik

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

yang tidak dapat dijangkau organisasi lain. Pentingnya rehabilitasi jangka panjang selain respons darurat untuk memastikan keberlanjutan sistem pendidikan setelah konflik berakhir.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diperoleh beberapa Kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Bahwa konflik bersenjata antara Rusia-Ukraina telah menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap hak-hak pendidikan jutaan anak-anak di Ukraina. Ribuan sekolah hancur, jutaan anak yang mengungsi, trauma psikologis yang mendalam, dan terputusnya akses pendidikan merupakan konsekuensi nyata dazri konflik yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam menghadapi krisis ini, UNICEF, UNESCO, dan ICRC telah memainkan peran yang saling melengkapi namun tetap khas sesuai dengan mandat masing-masing organisasi.

UNICEF, dengan fokusnya pada respons operasional langsung dan kepemimpinan dalam koordinasi kemanusiaan, telah menjadi garda terdepan dalam memastikan kelangsungan akses pendidikan bagi jutaan anak-anak Ukraina melalui berbagai program inovatif. UNESCO, dengan kekuataanya dalam dimensi kebijakan dan normatif, telah memberikan kontribusi penting dalam pemantauan situasi, dukungan kebijakan, dan koordinasi internasional. ICRC, dengan mandatnya yang unik berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, telah memainkan peran yang tidak tergantikan dalam mendorong kepatuhan semua pihak terhadap norma-norma perlindungan warga sipil, termasuk fasilitas pendidikan.

Namun, meskipun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ketiga organisasi ini sangat signifikan, tantangan yang dihadapi jauh melebihi kapasitas yang tersedia. Skala krisis, kompleksitas situasi, keterbatasan akses, dan kendala pendanaan merupakan hambatan serius yang membatasi efektivitas respons internasional. Rekomendasi-rekomendasi yang dikekemukakan dalam bab ini, meliputi peningkatan pendanaan berkelanjutan, penguatan koordinasi, investasi dalam dukungan psikososial, penguatan advokasi perlindungan, dan perencanaan rekonstruksi jangka panjang, merupakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak pendidikan anak di Ukraina.

Pada akhirnya, perlindungan hak pendidikan anak di zona konflik bukan sekedar tantangan kemanusiaan, tetapi juga merupakan investasi fundamental bagi masa depan perdamaian dan pembangunan. Generasi anak-anak yang kehilangan pendidikan akibat konflik adalah generasi yang akan menanggung beban konflik tersebut jauh melampaui berakhirnya pertempuran aktif. Sebaliknya, generasi yang berhasil mempertahankan akses pendidikan meski di tengah konflik adalah generasi yang memiliki kapasitas lebih besar untuk membangun perdamaian berkelanjutan dan kemakmuran bagi diri mereka sendiri dan bagi negara mereka. Inilah yang menjadikan perlindungan hak pendidikan anak di wilayah konflik bukan hanya sebuah kewajiban hukum, melainkan juga sebuah imperatif moral dan strategis bagi seluruh komunitas internasional.

B. Saran

Perlindungan hak-hak pendidikan anak di wilayah konflik Rusia-Ukraina merupakan kewajiban Hukum Internasional yang mengikat berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989 dan Hukum Humaniter Internasional, bukan hanya kewajiban moral.

Kerja sama antara UNICEF, UNESCO dan ICRC serta komunitas internasional sangat diperlukan untuk mewujukan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan hak-haknya dan memberdayakan anak-anak Ukraina.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Dengan implementasi praktiknya, diharapkan perlindungan hak pendidikan anak di wilayah konflik Rusia-Ukraina dapat semakin diperkuat, sehingga anak-anak di Ukraina dapat tetap memiliki akses pendidikan yang layak meskipun dalam situasi konflik bersenjata, dan masa depan mereka tidak terancam oleh dampak perang yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darwan prinst, (hukum anak indonesia), Citra aditya bakti, Bandung, 2003, hal 103-119

Jimly Asshidiqie dan Hafid Abbas, (Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia) Jakarta:Prenada Media Group, 2005) hlm 2.

Lili Rasijidi dan B. Arief Sidharta, 1994, (Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi), Bandung, Hlm.64

Pease, K.-K. S. (2018). International organizations: Perspectives on global governance (6th ed.). New York: Routledge

Philipus M. Hadjon, 1987, (Perlindungan Rakyat), Surabaya, Hlm.38

Rudolf M. Schindler, 1979, (Armed Conflict), Germany

Satjipro Rahardjo, 2000, (Ilmu Hukum), Bandung, Hlm.53

Soerjono & Sri Mamudji, 2001, (Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.14

JURNAL

Dietrich Schindler, 'International Humanitarian Law And Internationalized Internal Armed Conflicts' (University of Basel Library 2021).[255].

H. Agus Asri Sabana. 2012. (perkembangan Emosional Pada Anak). Vol 1 No 1.

Murthy, R. S., & Lakshminarayana, R. (2006). Mental health consequences of war: A brief review of research findings. World Psychiatry, 5(1), 25–30

R. La Ponta, 2000, (Investor Proctection and Corporate Governance). Hal.58

Teguh Sulistia, 2021, (Indonesian Journal Internasional Law), Vol.4, Hlm.536 Diakses pada tanggal 23 Juni 2025

ARTIKEL/WEBSITE

Amnesty International, 2024, (Armed Conflict), Artikel, Diakses pada tanggal 24 June 2025 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/armed-conflict/

File:///C:/Users/user/Downloads/20210-76132-2-PB.pdf page 8

How is "Armed Conflict" defined IHL, ICRC, 2024

Keisya Maharani, 2025, (Hukum Humaniter Internasional dan Tantangan dalamEra Konflik Kontemporer), artikel, Diakses 18 Juli 2025 5.02 WITA

LegalClarity Team, 2025, (What Legally Constitutes an Armed Conflict), 20Artikel,

Mykhailo Turianystsia, (2025), Another 10 schools repaired in Ukraine with EU support – thousand of children to return to classroom this autumn, Artikel

opac.fhukum.unpatti.ac

Putri Damayanti, 2025, (Hak Atas

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Pendidikan), Artikel, Diakses pada tanggal 20 Juni 2025

Right To Education, 2022, Artikel, Diakses pada tanggal 20 Juni 2025 https://www.right-to-education.org/page/international-law

Shehzad Noorani, 2021 (Konvensi Hak Anak UNICEF), artikel dilihat pada pasal 28

UNDRR, 2025, (Conflict). Artikel

Yulia Gurborna, 2021, Ukraine Becomes 100th Country to Endorse Safe Schools Declaration, Over 750 Ukrainian Education Facilities Damaged, Destroyed in Fighting, Artikel, Ukraine

Zama Neff, 2024, 120 Countries Have Signed The Safe School Declaration. Sadly, The U.S. Isn't One Of Them, Artikel

SKRIPSI/TESIS

Aisyah Fitriani, 2024, (Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Konflik Bersenjata Dari Kacamata Hukum Humaniter Internasional), Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Hlm.4 Tanggal 13 Juni 2025

Dinul Haq Qayiim D, 2022, (Penerapan Pembedaan dalam Konflik Bersenjata di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional), Makassar, Skripsi, Universitas Hassanudin, Diakes pada tanggal 24 Juni 2025

Setiono, 2004, (Rule Of Law), Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm.3

Sri Wahyuni, 2024, (Peran UNICEF dalam menangani permasalahan anak korban konflik Rusia-Ukraina 2022), Thesis, Universitas Andalas

Dokumen Resmi

6 NN 'International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts', (2011) Report document prepared by the ICRC in the 31st International Conference of the Red Cross and red Crescent.[8].

Convention on the Rights of the Child Part 1 Article 2, 198.

Council of the European Union. (2022). Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine

Global Education Cluster. (2020). Global education cluster strategic plan 2021–2023: Co-led by UNICEF and Save the Children. Geneva: Global Education Cluster.

Global Policy Institute. (2025). Compounding mandates: The friction and synergy between UN agencies and the ICRC in the Ukraine crisis. London: GPI Research Press

Harroff-Tavel, M. (2021). The humanitarian diplomacy of the International Committee of the Red Cross. Geneva: International Committee of the Red Cross

Inter-Agency Standing Committee (IASC). (2024). In-depth evaluation of the inter-agency humanitarian response in Ukraine: Operational efficiencies and structural barriers

International Committee of the Red Cross (ICRC). (1977). Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Conflicts (Protocol I). Geneva: ICRC.

International Committee of the Red Cross (ICRC). (2000). Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 25 May 2000. Geneva: ICRC IHL Databases.

Kharkiv City Council. (2024). Operational framework and technical design of the newly constructed Kharkiv underground school. Kharkiv: Mayor's Office Media Service

Kharkiv City Council. (2024). The launch of Ukraine's first purpose-built underground school in Kharkiv. Kharkiv: Mayor's Office Media Service.

Konvensi Jenewa, 1949, Article 2

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2026). Saveschools: Interactive map of destroyed and damaged educational institutions in Ukraine. Kyiv: MESU.

OECD. (2023). The integration of Ukrainian refugee children in host countries' education systems: Challenges and practices

Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict. (2014). Guidelines: Monitoring and reporting mechanism on grave violations against children in situations of armed conflict. New York: United Nations.

Pictet, J. S. (Ed.). (1958). Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949: Volume IV: Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva: International Committee of the Red Cross.

Right of Education, UNESCO, 2020

Sandoz, Y., Swinarski, C., & Zimmermann, B. (Eds.). (1987). Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949. Geneva: International Committee of the Red Cross & Martinus Nijhoff Publishers.

Staufer Brian, 2020, (With Million Out of School, The Countdown Begins to Get All Children into Quality, Accessible Education), Human Right Watch

Spoljaric, M. (2023). A call for respect for International Humanitarian Law in Ukraine and global conflicts. Geneva: International Committee of the Red Cross

The Right Of Education, UNICEF, 2021

UNESCO. (2021). Scoping Progress in Education (SCOPE) online database. Paris: Global Education Monitoring Report / UNESCO.

UNESCO, 2023 (Removing Scars Of War Iraq Through Education), Diakses tanggal 12 Juni 2025

UNESCO. (2023). What UNESCO does in education: Mandate and core priorities. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2024). Assessing the damages and structural impacts on education in Ukraine. Paris: UNESCO

UNESCO. (2024). Recommendation on education for peace, human rights and sustainable development. Paris: UNESCO.

UNESCO. (2026). Four years on: Supporting culture, education, sciences and

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

journalist's safety in Ukraine. Paris: UNESCO

UNICEF Ukraine. (2023). Back to learning: Ensuring education continuity for children in Ukraine. Kyiv: UNICEF Press Centre

UNICEF. (2021). UNICEF strategic plan 2022–2025: Renewed ambition for every child. New York: UNICEF Executive Board

UNICEF. (2023). Education under attack in Ukraine: Digital learning solutions and the resilience of the sub-sector. Kyiv: UNICEF Ukraine Country Office

UNICEF. (2024). Education continuity and learning loss in Ukraine: Assessing equity and access under crisis. Kyiv: UNICEF Ukraine Country Office

UNICEF. (2024). In the dark: The impact of electricity shortages on children's education in Ukraine. Kyiv: UNICEF Ukraine Country Office.

UNICEF. (2024). The psychological toll: War, chronic stress, and the mental health of children in frontline regions of Ukraine

UNICEF. (2024). UNICEF Ukraine humanitarian situation report (Mid-year review). Kyiv: UNICEF.

UNICEF, & UNHCR. (2023). Blue Dot hubs: A joint UNICEF-UNHCR UNHCR initiative for protection and support services for children and families displaced from Ukraine.

UNICEF, & UNHCR. (2024). Education on the move: Integration of Ukrainian refugee children in European host countries' education systems

UNICEF, & UNESCO. (2024). Joint framework for educational recovery in Ukraine: Bridging immediate learning needs and systemic digital transformation

United Nation Treaty Collection, 2021, (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right). Hlm.1

United Nations. (1979). Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). United Nations Treaty Series, vol. 1125, p. 3.

United Nations. (2014). Guidelines: Monitoring and reporting mechanism (MRM) on grave violations against children in situations of armed conflict. New York: United Nations.

Universal Declaration Of Human Right, 2016, Article 26

World Bank. (2023). Ukraine education sector analysis: Navigating the crisis and building for the future. Washington, D.C.: World Bank Group.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026